



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 38 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 );
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemprov Jateng adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangda adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangda sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut IKU Pemprov Jateng adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangda adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangda, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangda Tahun 2018-2023.
16. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan RPJMD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
17. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan Renstra Perangda adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Sasaran Strategis Renstra Perangda adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



20. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Program RPJMD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
22. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemprov Jateng dan Perangda dalam menyusun dokumen SAKIP.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemprov Jateng dan Perangda yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

## BAB II PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

### Pasal 5

- (1) IKU yang disusun Perangda harus sesuai dan selaras dengan IKU Pemprov Jateng.

- (2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemprov Jateng sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan
  - b. IKU Perangda sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
- (3) IKU Pemprov Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) IKU Perangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra Perangda, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

### BAB III PENGUNAAN IKU

#### Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 8

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemprov Jateng dan Perangda sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangda harus dinyatakan dengan IKU.

#### Pasal 9

- (1) Pemprov Jateng dan Perangda melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV  
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,  
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **17 Oktober 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **17 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2018-2023

Visi

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”  
*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*

Misi

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>			
Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyub	Persentase penurunan konflik SARA	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar penurunan konflik sara di masyarakat.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah konflik sara yg ditangani dlm 1 tahun Jml seluruh konflik SARA</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Badan Kesbangpol</li> <li>• Sumber Data : Pengadilan Negeri/Kepolisian</li> </ul>
<b>Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota</b>			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>goodgovernance and clean government</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa</li> </ul>

MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\text{Indeks RB} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Nilai Maks/ Bobot}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Inspektorat, Bappeda, BKD, Diskominfo, BPSDMD, Biro Organisasi</li> <li>• Sumber Data : Kemenpan dan RB</li> </ul>
<b>Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran</b>			
1. Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	Angka	$PO = \frac{Q}{n} \left[ \frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ <p>Dimana :            PO = Rasio Kesenjangan Kemiskinan (<i>Proverty Gap</i>)            Z = Garis Kemiskinan            Q = Jumlah Penduduk Miskin            Y<sub>i</sub> = Pendapatan individu penduduk miskin            n = Jumlah Penduduk</p>
	2) Indeks Gini	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan kesenjangan pembangunan Antar Wilayah di Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">G_1 = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})</math> </li> </ul> <p>di mana:            X<sub>k</sub> = kumulatif proporsi populasi            Y<sub>k</sub> = kumulatif proporsi income/pendapatan            Y<sub>k</sub> diurutkan dari kecil ke besar            Nilai G<sub>1</sub> di sini adalah perkiraan dari nilai G.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Bappeda</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	3) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari</li> </ul>

MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
2. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengingat Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">PDB_t = PDB_0 (1+R)^t</math> <p>Keterangan:  PDB(t) = Produk domestik bruto periode t  PDB(0) = Produk domestik bruto periode awal  r = Tingkat pertumbuhan  t = Jarak periode</p> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bappeda, Dinkop UMKM, Disperindag Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	2) Inflasi	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Hal ini penting dikendalikan agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%</math> <p>Keterangan :  Inf<sub>n</sub> = nilai inflasi pada tahun n</p> </li> </ul>

MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p><math>Inf_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya n= tahun ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	3) PDRB per kapita	Juta Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	4) Indeks Williamson	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipasang untuk mengukur kesenjangan pendapatan, antar wilayah dalam satu provinsi sehingga mempermudah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan akan tepat sasaran.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i}}{Y}</math> </li> </ul> <p>Dimana:  Untuk kabupaten/kota:  <math>Y_i</math> = PDRB perkapita di kecamatan I  <math>Y</math> = PDRB perkapita rata-rata kab/kota  <math>F_i</math> = jumlah penduduk di kecamatan  <math>n</math> = jumlah penduduk di kab/kota  Untuk provinsi  <math>Y_i</math> = PDRB perkapita di kab/kota i  <math>Y</math> = PDRB perkapita rata-rata provinsi  <math>f_i</math> = jumlah penduduk di kab/kota i  <math>n</math> = jumlah penduduk di provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab :</li> </ul>

MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Bappeda • Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah
	5) Nilai Tukar Petani	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani sebagai pekerjaan mayoritas penduduk Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">NTP = \frac{i_a}{i_b} \times 100\%</math> <p><i>i<sub>a</sub></i> : Indeks harga yang diterima petani  <i>i<sub>b</sub></i> : Indeks harga yang dibayar petani  NTP : Nilai Tukar Petani</p> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab : Bappeda</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan</b>			
1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas danberdaya saing	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan di masa mendatang. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Pendapatan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">IPM = 1/3 \sum \text{Indeks (i,j)}</math> <p>Keterangan :  Indeks X (i,J) = Indeks komponen IPM ke i untuk wil.  Ke j  I = 1,2,3  j = 1,2, ..... k wilayah</p> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Komulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab : Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan gender pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mengingat IPG Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  IPG diukur dengan cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah</li> </ul>



MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dan Rata-rata pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
2. Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">IKLH_{Provinsi} = (PA \cdot 30\%) + (IPU \cdot 30\%) + (ITH \cdot 40\%)</math> <p> <small>           Keterangan:            IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi            PA = indeks parameter air            IPU = indeks parameter udara            ITH = indeks parameter tanah         </small> </p> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• SKPD Penanggungjawab : Bappeda</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan  
YANG DILAKSANAKAN  
TUGAS POKOK

: Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI

- : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)		(3)
<i>Tujuan 1 :</i>			
Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan pemerataan akses layanan SMA/ SMK dan SLB</li> <li>Formulasi Pengukuran : APK SMA/SMK/SLB kab/kota tertinggi - APK SMA/SMK/SLB kab/kota terendah</li> <li>Tipe Perhitungan : Analitik kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>			
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	Persentase Sarpras SMA/SMK/S LB sesuai standar	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar</li> <li>Formulasi Pengukuran (Jumlah sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar/ Jumlah sarpras SMA/SMK/SLB di Jawa Tengah)X100%</li> <li>Tipe Perhitungan : Analitik kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/S LB	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada ketercukupan guru yang ideal.</li> <li>Formulasi Pengukuran : (Jumlah Guru SMA/SMK/SLB)/(Jumlah rata - rata rombel ideal pertahun)</li> <li>Tipe Perhitungan : Analitik kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Persentase Guru SMA/SMK/S LB memenuhi kualifikasi Akademik	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutuguru SMA/ SMK dan SLB yang memenuhi kualifikasi akademik</li> <li>Formulasi Pengukuran : (Jumlah Guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi S1/D4)/(Jumlah Guru SMA/SMK/SLB)</li> <li>Tipe Perhitungan : Analitik kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)		(3)
<i>Tujuan 2 :</i>			
Penguatan karakter dan ketahanan budaya	Angka Partisipasi Seni dan Budaya	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya di Jawa Tengah</li> <li>Formulasi Pengukuran : <math>(\text{Jumlah pelaku seni dan budaya yang aktif}) / (\text{Jumlah pelaku seni dan budaya}) \times 100\%</math></li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>			
Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya.	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan fasilitas seni budaya</li> <li>Formulasi Pengukuran : <math>(\text{jumlah fasilitas seni, budaya dan bahasa}) / (\text{jumlah dan jenis seni budaya dan bahasa}) \times 100\%</math></li> <li>Tipe Perhitungan : Analitik kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Urusan Wajib Kesehatan
- : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI** :
- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
  - 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota
  - 4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan
  - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
  - 6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
  - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)		(3)
<i>Tujuan :</i>			
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi penghitungan : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>			
Menurunnya Angka Kesakitan dan kematian	Angka kematian ibu.	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu (maternal) terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, karena mengingat setiap kehamilan itu beresiko dan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.</li> <li>• Formulasi Penghitungan : <math>\frac{\text{Jml Kematian ibu}}{\text{Kelahiran Hidup}} \times 100.000</math> dalam satu tahun.</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

	Angka kematian bayi	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng-evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberi kan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan keseha- tan, mengingat pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada pening- katan kesehatan ibu, bayi, balita.</li> <li>• Formulasi Penghitungan : <math>\frac{\text{Jml Kematian Bayi}}{\text{Jml Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 1.000</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Prov. Jateng</li> </ul>
	Angka Kematian Balita	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberi kan pengaruh pada peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehat-an, mengingat pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prio ritasnya diarahkan pada peningkat an kesehatan ibu, bayi, balita &amp; KB.</li> <li>• Formulasi Penghitungan : <math>\frac{\text{Jumlah Kematian Balita}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 1.000</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Prov. Jateng</li> </ul>
	Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TB, HIV, Malaria, dan DBD), dengan melihat gambaran ketercapaian target dari kinerja program TB, HIV, Malaria dan DBD yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.</li> <li>• Formulasi Penghitungan : <math>\frac{\text{Capaian kinerja program (TB, HIV, Malaria, BDB)}}{4} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : PTM merupakan penyebab kematian kasus tertinggi di masyarakat (Hipertensi, DM) dan dapat dikendalikan faktor risikonya. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes mellitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat/ODGJ), dengan melihat gambaran ketercapaian target dari kinerja program Hipertensi, Diabetes mellitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat/ODGJ yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.</li> <li>• Formulasi Penghitungan : <math>\frac{\text{Capaian kinerja program (Hipertensi, DM, ODGJ)}}{3} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	Persentase pelayanan	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan bagi penduduk</li> </ul>

	<p>kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi</p>		<p>terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi. Indikator ini merupakan indikator Standar pelayanan Minimal Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jml pelayanan bagi pdd terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana Provinsi}}{\text{jumlah pdd terdampak kris kesehatan akibat bencana : berpotensi bencana Provinsi}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	<p>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan</p>	<p>%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk melihat mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dan rujukan (RSUD) yang sudah sesuai ketentuan (diakreditasi) yang merupakan legalisasi pelayanan kesehatan.</li> <li>• Formulasi Penghitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah fayankes primer dan sekunder yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh fasyan Kes Primer ( rujukan)}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	<p>Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi</p>	<p>Angka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk melihat/ mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga.</li> <li>• Formulasi Penghitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah keluarga dengan kategori "sehat"}}{\text{jumlah seluruh keluarga yang didata}}</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

URUSAN :  
PEMERINTAH YANG  
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, air limbah, drainase pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

FUNGSI : a Perumusan, Pengoordinasian dan Pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.  
b Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.  
c Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.  
d Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)		(3)
<i>Tujuan 1 :</i>			
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Provinsi Sebagai Jalan Kolektor	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor dengan Lebar Jalan minimal 7,00 meter</li> <li>Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor th - n}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya}} \times 100</math></li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>			
Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi baik untuk melayani pengguna jalan dan meningkatkan konektivitas jaringan jalan di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan kondisi permukaan baik th - n}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya}} \times 100</math></li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatkan panjang kualitas	Persentase Panjang Jalan	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar Jalan Provinsi sebagai</li> </ul>



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)		(3)
struktur dan kapasitas jalan dan jembatan sesuai standar jalan provinsi	provinsi sesuai standar jalan kolektor Baik		<p>Jalan Kolektor dengan Lebar Jalan minimal 7,00 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor th - n}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya}} \times 100</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Tujuan 2 :</i>			
Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase akses aman air minum perkotaan dan perdesaan	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan indikator : Untuk mengetahui pemenuhan dasar kondisi air minum.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perkotaan}}{\text{Jumlah penduduk perkotaan di Provinsi Jateng}}</math>   <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perdesaan}}{\text{Jumlah penduduk perdesaan di Provinsi Jateng}}</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>			
Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase akses aman air minum perkotaan;</li> <li>2. Persentase akses aman air minum perdesaan.</li> </ol>	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan indikator : untuk mengetahui pemenuhan dasar kondisi air minum.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perkotaan th}}{\text{Jumlah penduduk perkotaan di Provinsi Jateng}}</math>   <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perdesaan th}}{\text{Jumlah penduduk perdesaan di Provinsi Jateng}}</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Prov. Jateng dalam kondisi menuju berfungsi dengan baik sesuai standard	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan indikator : Untuk mengetahui bantuan teknis bagi bangunan gedung milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Komplek BGMD Pro. Jateng dalam Kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar th - n}}{\text{Jumlah total Komplek BGMD Prov. Jateng}}</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN  
PENATAAN RUANG TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS** : Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar)
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- FUNGSI** : 1). perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;  
2). pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;  
3). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;  
4). pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
5). pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<b>Tujuan</b>		
Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang.	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pelayanan sarana dan prasarana Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari (persentase kualitas sarana dan prasarana SDA + persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR).</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU SDA TARU.</li> <li>• Penanggungjawab : Dinas PU SDA TARU.</li> </ul>
<b>Sasaran</b>		

<p>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.</p>	<p>Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : rata-rata dari (Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi + persentase pemenuhan kebutuhan air baku + persentase sungai dalam kondisi baik + persentase luas daerah bebas genangan banjir)</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU SDA TARU.</li> </ul>
<p>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR.</p>	<p>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\sum \text{pemanfaatan ruang yg sesuai RTR}}{\sum \text{pemanfaatan ruang}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas PU SDA TARU.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
2. Pertanahan
- : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan 1 :</i>		
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan Jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah rumah layak huni + capaian jumlah penganan rumah tidak layak huni)/ dengan Jumlah rumah x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Luas Kawasan Permukiman yang tertangani dibagi Luas Kawasan Permukiman) x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Prosentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak peningkatan jumlah rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (N-1)} - \text{Jumlah Rumah Layak Huni (N)}}{\text{Jumlah rumah layak huni (N) kumulatif N+(N+1)}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Prosentase penurunan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Luasan kawasan kumuh dikurangi luasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luasan kawasan kumuh}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Tujuan 2 :</i>		
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah bidang tanah yang tertangani}}{\text{Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul>
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Prosentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah bidang tanah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Sosial
- FUNGSI : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ;  
b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ;  
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial , Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ;  
d. Pelaksanaan, Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas ; dan  
e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Menurunkan Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PMKS di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Perhitungan : Jumlah PMKS dibagi jumlah Penduduk x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Sosial Prov.Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya Populasi PMKS	Prosentase PMKS yang dientaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui PMKS yang dientaskan</li> <li>• Formulasi Perhitungan : jumlah PMKS yang dientaskan dibagi Jumlah PMKS yang menjadi kewenangan x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Sosial Prov.Jateng</li> </ul>
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PSKS di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Perhitungan : Populasi PSKS dibagi Populasi Penduduk x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data :</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Dinas Sosial Prov.Jateng
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan serta dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PSKS yang berperan sereta dalam usaha kesejahteraan sosial</li> <li>• Formulasi Perhitungan : Populasi PSKS yang berperan serta dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dibagi Populasi PSKS x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Sosial Prov.jateng</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAH : Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;  
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mengurangi jumlah pengangguran	Persentase pengangguran yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar jumlah pengangguran di Jawa Tengah yang ditangani/ ditempatkan /bekerja</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan) / (jumlah pengangguran terbuka atau perkiraan jumlah pengangguran terbuka) x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Nakertrans Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kompeten sebagai persediaan tenaga kerja di pasar kerja</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah tenaga kerja yang kompeten pada tahun berjalan (n) dikurangi jumlah tenaga kerja tahun lalu (n-1) dibagi jumlah tenaga kerja yang kompeten tahun lalu (n-1) ) dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk melihat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah total PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan pada tahun n dibagi jumlah orang yang bekerja pada tahun n ) dikalikan 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPS</li> </ul>
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me-ngevaluasi jumlah pencari ker-ja yang ditempatkan dengan lowongan kerja yang tersedia.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar ) dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui penciptaan lapangan kerja yang layak melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor informal dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam perluasan kesempatan kerja.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal dibagi jumlah tenaga kerja di sektor informal yang dibina ) dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
Meningkatnya perindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan industrial (HI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah perselisihan kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dibagi jumlah perselisihan terdaftar) dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memberikan dan meningkatkan perlindungan pada pekerja melalui kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah .</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun n di Jawa Tengah dibagi jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah) dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data :</li> </ul>

		<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja</p>	<p>Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan dibagi jumlah perusahaan yang diperiksa ) x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>• Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018 – 2023

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan sekretariat kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah	Tingkat Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Tingkat kemandirian Desa merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan Desa di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{JumlahDesamandiri}}{\text{JumlahDesa di Jateng}} \times 100</math> </li> <li>• Jenis Data : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : KementerianDesa, PDTT dan KPW Prov. Jateng</li> <li>• Unit Kerja Penanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng.</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	Persentase peningkatan Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan klasifikasi Desa Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju menjadi Desa Mandiri, mengingat</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
		<p>jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah masih sangat kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{JumlahDesamandiri tahun n dikurangitahun n-1}}{\text{JumlahDesaMandiri}} \times 100</math> </li> <li>• Jenis Data : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng</li> <li>• Unit KerjaPenanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya penduduk yang tertib mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, akan semakin valid data kependudukan untuk data perencanaan pembangunan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlahpenduduk yang memilikidokumenkependudukan}}{\text{Jumlahpenduduktotal di Jawa Tengah}} \times 100</math> </li> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng</li> <li>• Unit KerjaPenanggungjawab : Dispermades dukcapil Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat terwujud</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlahpenduduk yang terlayani dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk total Jawa Tengah}} \times 100</math> </li> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng</li> <li>• Unit Kerja Penanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng</li> </ul>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN** : 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**FUNGSI** :

1. perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan		
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur keberadaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Menjumlahkan Indeks Keterwakilan perempuan dalam Parlemen, Indeks Pengambilan Keputusan dan Indeks Distribusi Pendapatan dibagi tiga</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Badan Pusat Statistik</li> </ul>
Sasaran		
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur pendapatan kerja perempuan di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Proporsi penduduk perempuan dibagi proporsi sumbangan pendapatan perempuan) ditambah (Proporsi penduduk laki-laki dibagi proporsi sumbangan pendapatan laki-laki) dikuadratkan -1) dikalikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan) dikurangi 360) dibagi (732,72 dikurangi 300)</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI</li> <li>• Penanggung Jawab: DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak melalui perolehan penghargaan KLA Tingkat Nindya dan Tingkat Utama</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah kab/kota yang telah memperoleh penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Nindya dan Tingkat Utama dibagi Jumlah seluruh kab/kota) dikalikan 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Kementerian PPPA RI</li> <li>• Penanggung Jawab: DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA yang menunjukkan komitmen Pemda dan stakeholder untuk memenuhi hak anak dan membangun lingkungan yang layak bagi anak</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah launching/deklarasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) <u>35 Kabupaten/Kota</u></li> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif <math>\times 100\%</math></li> <li>• Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengevaluasi Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah korban kekerasan thdp perempuan dewasa dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak dikalikan 100.000</li> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan,</li> </ul>

		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
<b>Sasaran</b>		
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kasus Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Tengah pada tiap 100.000 penduduk perempuan dewasa dan anak</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi dibagi Jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi) dikalikan 100.000</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : SIMFONI PPA Kementerian PPPA RI</li> <li>• Penanggung Jawab: DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>
<b>Tujuan</b>		
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur angka kelahiran total di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>5\sum^7</math> dikalikan ((Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun pada tahun tertentu dibagi Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun yang sama) dikalikan 1.000)</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BKKBN RI</li> <li>• Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>
<b>Sasaran</b>		
Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur tingkat kesertaan ber-KB dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur) dikalikan 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BKKBN RI</li> <li>• Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur banyaknya Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : (Jumlah keluarga pra sejahtera tingkat provinsi dibagi jumlah seluruh keluarga tingkat provinsi) dikalikan 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BKKBN RI</li> <li>• Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Pangan
2. TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah
3. FUNGSI : a. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;  
b. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;  
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi kelompok bahan pangan</li> <li>• Formulasi Pengukuran: % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
1.1 Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang	PPH Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman ketersediaan kelompok bahan pangan</li> <li>• Formulasi Pengukuran: % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan yang tersedia.</li> </ul>



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan: Non kumulatif.</li> <li>• Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah energi dan protein yang dikonsumsi rata-rata per orang di suatu wilayah</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah energi dan jumlah protein 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

1. URUSAN PEMERINTAH YG DILAKSANAKAN : PERTANIAN
2. TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. FUNGSI : a Perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;  
 b Pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;  
 c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;  
 d Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; dan  
 e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sub Sektor Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sub Sektor Peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ketahun tanpa dipengaruhi faktor harga.</li> <li>• Formulasi Pengukuran:  <math display="block">(\%) = \frac{\{PDRB (th\ n) - PDRB (th\ n-1)\}}{PDRB (th\ n-1)} \times 100 \%</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Produksi : a. Daging b. Susu c. Telur	Jumlah Produksi a. Daging b. Susu c. Telur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: indikator ini dipilih karena produksi daging, susu dan telur merupakan salah satu aspek penyuplai PDRB Sub Sektor Peternakan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produksi daging pada tahun berjalan;</li> <li>- Jumlah produksi susu pada tahun berjalan;</li> <li>- Jumlah produksi telur pada tahun berjalan.</li> </ul> </li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

1. URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Kelautan dan Perikanan
2. TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
3. FUNGSI : a perumusan kebijakan Bidang PerikananTangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;  
 b pelaksanaan kebijakan Bidang PerikananTangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;  
 c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;  
 d pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja sub sektor perikanan terhadap perekonomian Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">(\%) = \frac{(X - Y)}{Y} \times 100\%</math>           X :PDRB atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun n)            Y : PDRB atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun n-1)</li> <li>• Tipe Penghitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	1) Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama satu tahun guna menunjukkan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan hewani</li> <li>• Formulasi Pengukuran :</li> </ul>

		<p>Σ <i>Tangkapan ikan dan Produksi Budidaya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	2) Angka Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah konsumsi ikan di Jawa Tengah, mengingat angka konsumsi ikan di Jawa Tengah masih rendah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : AKI = A + B + C AKI = Angka Konsumsi Ikan A : konsumsi dalam rumah tangga, angka berdasarkan hasil susenas B : perhitungan konsumsi ikan di luar RT (horeka, asrama, rs, ponpes dsb) C : perhitungan konsumsi ikan yang tidak terduga, di luar hitungan A,</li> <li>• Tipe Penghitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah dan KKP</li> <li>• Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2023**

1. URUSAN PEMERINTAH : Perindustrian dan Perdagangan  
 YANG DILAKSANAKAN

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;  
 b. Pengkoordinasian kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;  
 c. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;  
 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;  
 e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas; dan  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan 1 :</i>		
Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah.	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur seberapa besar peran sektor industri terhadap total PDRB Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{PDRB industri}}{\text{Total PDRB}} \times 100</math> </li> <li>• Tipe penghitungan : Non kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS, Disperindag</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.	Persentase laju sektor industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor industri di Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi pengukuran :  <math display="block">\frac{\Sigma \text{PDRB industri}_t - \Sigma \text{PDRB industri}_{t-1}}{\Sigma \text{PDRB industri}_{t-1}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe penghitungan : Non kumulatif</li> <li>• Sumber data :</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		BPS, Disperindag.
		•
<i>Tujuan 2 :</i>		
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur seberapa besar peran sektor perdagangan terhadap total PDRB Jawa Tengah</li> <li>Formulasi pengukuran : <math display="block">\frac{\text{PDRB perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100</math></li> <li>Tipe penghitungan : Non kumulatif</li> <li>Sumber data : BPS, Disperindag.</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.	Persentase laju sektor perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor pertambangan di Jawa Tengah.</li> <li>Formulasi pengukuran : <math display="block">\frac{\Sigma \text{PDRB dag}_t - \Sigma \text{PDRB dag}_{t-1}}{\Sigma \text{PDRB dag}_{t-1}} \times 100\%</math></li> <li>Tipe penghitungan : Non kumulatif</li> <li>Sumber data : BPS, Disperindag.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

1. URUSAN PEMERINTAH YG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
2. TUGAS POKOK : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan PolaHubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan PolaHubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur perwujudan dari digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari penjumlahan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE dan Indeks Domain Layanan SPBE.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Kemenpan dan RB.</li> <li>• Penanggungjawab : Diskominfo</li> </ul>

Sasaran :		
MeningkatnyateknologiinformasidankomunikasiPemerintahProvinsiJawaTengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE. 2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE. 3) Indeks Domain Layanan SPBE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Berbasis Elektronik.</li> <li>Formulasi Pengukuran :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 1 dan aspek 2 SPBE;</li> <li>Indeks Domain Tata Kelola SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 3, aspek 4 dan aspek 5 SPBE;</li> <li>Indeks Domain Layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 6 dan aspek 7 SPBE.</li> </ol> </li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Kemenpan dan RB</li> <li>Penanggungjawab : Diskominfo</li> </ul>
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Urusan Pemerintahan Statistik Sektoral pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus dapat dimanfaatkan.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Laju pemanfaatan merupakan perbandingan antara selisih jumlah visitor tahun n dan n-1 dengan n-1 dikalikan 100%.               <math display="block">\frac{V_n - V_{n-1}}{C} \times 100</math> <p>Dengan:  <math>V_n</math> adalah jumlah visitor tahun berjalan.  <math>C</math> adalah konstanta jumlah visitor tahun dasar</p> </li> <li>Tipe Perhitungan : Laju pemanfaatan data per tahun.</li> <li>Sumber Data : Diskominfo</li> <li>Penanggungjawab : Diskominfo</li> </ul>
Terwujudnya aplikasi yang aman.	Persentase Aplikasi yang aman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Mewujudkan keamanan informasi berbasis elektronik untuk mendukung digitalisasi tatakelola Pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Persentase perbandingan jumlah aplikasi yang diamankan terhadap total aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.               <math display="block">\frac{A_i}{A_T} \times 100</math> <p>Dengan:  <math>A_i</math> adalah jumlah aplikasi yang diamankan;  <math>A_T</math> adalah jumlah seluruh aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada.</p> </li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</li> </ul>



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

1. URUSAN PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN : Koperasi dan UKM
2. TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
3. FUNGSI : a Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;  
b Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;  
c Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;  
d Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan  
e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan peran Koperasi & UKM dalam perekonomian Jateng	% kontribusi Koperasi & UKM terhadap PDRB Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah yang diukur dengan pendekatan pendapatan/omzet (koperasi dan UKM) terhadap PDRB Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi penghitungan : <math>(\text{Omzet Koperasi Provinsi} + \text{Omzet UKM yang dibina} / \text{PDRB Jateng}) \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : 1) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2) BPS Jawa Tengah</li> <li>• Unit Kerja Penanggung Jawab : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

<i>Sasaran :</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan persentase pertumbuhan omset koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % pertumbuhan omset Koperasi &amp; UKM Jawa Tengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar pertumbuhan omset Koperasi &amp; UKM Jawa Tengah untuk mendukung kontribusi KUKM terhadap Perekonomian Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Penghitungan <math>(\text{Omzet KUKM Th N} - \text{Omzet KUKM Th N-1x})</math></li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah	% pertumbuhan tenaga kerja Koperasi & UKM Jawa Tengah.	<p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Unit Kerja Penanggung jawab: Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar pertumbuhan tenaga kerja Koperasi &amp; UKM Jawa Tengah untuk mendukung kontribusi KUKM terhadap Perekonomian Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Penghitungan (naker KUKM Th N- naker KUKM Th N-1x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Unit Kerja Penanggung jawab : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN : Pertanian  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha;  
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha;  
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)
<i>Tujuan :</i>		
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR : Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan</li> <li>• FORMULASI PENGUKURAN :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah Produksi Padi pada tahun berjalan.</li> <li>2) Jumlah Produksi jagung pada tahun berjalan.</li> <li>3) Jumlah Produksi kedelai pada tahun berjalan.</li> <li>4) Jumlah Produksi bawang merah pada tahun berjalan.</li> <li>5) Jumlah Produksi cabe besar pada tahun berjalan</li> <li>6) Jumlah Produksi Tebu pada tahun berjalan</li> <li>7) Jumlah Produksi Kelapa pada tahun berjalan</li> <li>8) Jumlah Produksi Kopi pada tahun berjalan</li> </ol> </li> <li>• JENIS DATA : Data Sekunder : Data Produksi Pertanian BPS.</li> <li>• SUMBER DATA : BPS</li> </ul>

<i>Sasaran :</i>		
<p>Terwujudnya peningkatan produksi Pertanian dan perkebunan</p>	<p>1) Produksi Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi</li> <li>• Jagung</li> <li>• Kedelai</li> </ul> <p>2) Hortikultura :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawang merah</li> <li>• Cabe besar</li> </ul> <p>3) Perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tebu</li> <li>• Kelapa</li> <li>• Kopi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR : Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan</li> <li>• FORMULASI PENGUKURAN : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah Produksi Padi pada tahun berjalan.</li> <li>2) Jumlah Produksi jagung pada tahun berjalan.</li> <li>3) Jumlah Produksi kedelai pada tahun berjalan.</li> <li>4) Jumlah Produksi bawang merah pada tahun berjalan.</li> <li>5) Jumlah Produksi cabe besar pada tahun berjalan</li> <li>6) Jumlah Produksi Tebu pada tahun berjalan</li> <li>7) Jumlah Produksi Kelapa pada tahun berjalan</li> <li>8) Jumlah Produksi Kopi pada tahun berjalan</li> </ol> </li> <li>• JENIS DATA : Data Sekunder : Data Produksi Pertanian BPS</li> <li>• SUMBER DATA : BPS</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

- Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan : Energi dan Sumber Daya Mineral
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;  
2. Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara; ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;  
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan sekretariat kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan		
Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan	Konsumsi listrik per kapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa banyak konsumsi listrik Jawa Tengah per penduduk Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah konsumsi listrik dibagi jumlah penduduk Jawa Tengah</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng dan PT. PLN</li> </ul>
Sasaran		
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat	Rasio ketersediaan daya listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa banyak daya listrik yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan daya listrik</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng dan PT. PLN</li> </ul>
Meningkatkan pemanfaatan sumber	Persentase Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa besar pemanfaatan Energi</li> </ul>

energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi	Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi	<p>Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemanfaatan EBT dibagi Total kebutuhan energi) x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng, PT. PLN dan PT. Pertamina</li> </ul>
<b>Tujuan</b>		
Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa besar kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB</li> <li>• Formulasi Pengukuran: (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi jumlah PDRB) x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: BPS</li> </ul>
<b>Sasaran</b>		
Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mendorong kegiatan usaha pertambangan berizin</li> <li>• Formulasi Pengukuran: (Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dibagi Jumlah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi) x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatnya konservasi air tanah	Indeks Ketersediaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat konservasi air tanah dari pemanfaatan air tanah</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Potensi aman pengambilan air tanah dibagi Jumlah pengambilan air tanah</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

- URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah	Indeks Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan indikator : untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</li> <li>Formulasi Pengukuran  <math display="block">IKA = (\sum IP \text{ Kondisi Baik} \times \text{ bobot } 70) + (\sum IP \text{ Cemar Ringan} \times \text{ bobot } 50) + (\sum IP \text{ Cemar Sedang} \times \text{ bobot } 30) + (\sum IP \text{ Cemar Berat} \times \text{ bobot } 10)</math> </li> <li>Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>Sumberdata DLHK Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya Pencemaran Air Permukaan	Indeks Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan indikator : untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</li> <li>Formulasi Pengukuran  <math display="block">\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}</math> <p>Rumus metode IP:</p> <math display="block">IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}</math> <p>IP: Indeks Pencemaran  <i>C<sub>i</sub></i>: menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan  <i>L<sub>ij</sub></i> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j.            Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p> </li> <li>Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>Sumber data DLHK Prov. Jateng</li> </ul>
	Indeks Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan indikator :           <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan</li> <li>sebagai dasar dalam penyusunan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.</li> </ol> </li> <li>Formulasi Pengukuran  <math display="block">IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)</math> </li> </ul>



		Ieu indeks udara model EU <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data DLHK Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya pencemaran udara	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : Parameter SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya dan NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin</li> <li>• Formulasi Pengukuran SO2 :emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya NO2 : emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin</li> <li>• Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>• Sumber data DLHK Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : sebagai dasar informasi tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut</li> <li>• Formulasi Pengukuran  <math display="block">IKTL = 100 - \left( \frac{84,3 - TV \times 100}{54,3} \right)</math>           IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan            TV : Tutupan vegetasi</li> <li>• Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>• Sumber data DLHK Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya luasan tutupan lahan	Luas Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : indikator luas tutupan lahan merupakan parameter untuk mengukur Indeks Kualitas Tutupan lahan</li> <li>• Formulasi Pengukuran  <math display="block">TV = \frac{LTV}{LW}</math>           TV :Tutupanvegetasi            LTV :Luas Tutupan vegetasi (data Kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan vegetasi hasil perhitungan/intepretasi)            LW :Luas Wilayah</li> <li>• Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>• Sumber data DLHK Prov. Jateng</li> </ul>

	Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : untuk mengetahui perkembangan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan</li> <li>• Formulasi Pengukuran  <math display="block">PDRB = \frac{PDRB_t}{Total\ PDRB_t} \times 100</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>• Sumber data BPS Prov. Jateng</li> </ul>
Sasaran : Meningkatnya PDRB Subsektor kehutanan	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator : untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sub sektor Kehutanan atas dasar harga konstan</li> <li>• Formulasi Pengukuran            Pertumbuhan PDRB = <math display="block">\frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_t} \times 100</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan Non kumulatif</li> <li>• Sumber data BPS Prov. Jateng</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN** : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;  
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah	Tingkat Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Tingkat kemandirian Desa merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan Desa di Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa mandiri}}{\text{Jumlah Desa di Jateng}} \times 100</math> </li> <li>• Jenis Data : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	Persentase peningkatan Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan klasifikasi Desa Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju menjadi Desa Mandiri, mengingat jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah masih sangat kecil.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa mandiri</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)
		tahun n dikurangi tahun n-1 -----X 100 Jumlah Desa Mandiri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Data : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng</li> </ul>
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya penduduk yang tertib mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, akan semakin valid data kependudukan untuk data perencanaan pembangunan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah penduduk yang memiliki dok kependudukan -----X 100 Jumlah penduduk total di Jawa Tengah</li> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng</li> </ul>
Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat terwujud</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah penduduk yang terlayani dokumen kependudukan ----- X 100 Jumlah penduduk total Jawa Tengah</li> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar/Penanaman Modal
- FUNGSI : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;  
 b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;  
 c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;  
 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;  
 e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Realisasi Penanaman	Pertumbuhan Nilai Penanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator</li> <li>Indikator ini dipilih untuk mengetahui pertumbuhan nilai penanaman modal sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.</li> </ul>

<p>Modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.</p>	<p>Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : [Nilai PMA dan PMDN tahun n - Nilai PMA dan PMDN tahun (n-1) / Nilai PMA dan PMDN tahun (n-1)] x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<p><i>Sasaran :</i></p>		
<p>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran* : <math display="block">\frac{\text{Total nilai semua Unsur}}{\text{jumlah responden} \times \text{jml Unsur}} \times 25</math> <i>*) berdasarkan Permen PAN&amp; RB RI No. 14/2017</i></li> <li>• Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<p>Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN</p>	<p>Persentase Realisasi PMA dan PMDN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penanaman modal per tahun.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\text{Realisasi Investasi PMA dan PMDN}}{\text{Target Nilai Investasi PMA \&amp; PMDN}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS : Unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah  
: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI : 1) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;  
2) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;  
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;  
4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan  
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)
<i>Tujuan :</i>		
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai suatu bentuk keterkaitan antara sarana prasarana transportasi, jaringan transportasi serta keselamatan transportasi dalam mendukung konektivitas antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Ratio capaian prosentase pelayanan transportasi di kali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya meningkatkan ketersediaan penyediaan penyelenggaraan jasa layanan distribusi angkutan serta simpul dan jaringan transportasi sebagai ruang pergerakan, dalam menjaga keseimbangan antara penyediaan (Supply) dan permintaan (Demand) transportasi.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Ratio capaian prosentase layanan</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data)
		<p>jaringan distribusi transportasi di kali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya meningkatkan keselamatan transportasi melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Ratio rata – rata capaian prosentase keterpenuhan fasilitas keselamatan transportasi dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Angkutan umum Aglomerasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : target headway dikurangi selisih headway eksisting dengan target headway dibagi target headway dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Komulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : 1. Kearsipan  
YANG DILAKSANAKAN 2. Perpustakaan

TUGAS POKOK : Dinas Arpus membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan  
2) pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan  
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan  
4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, dan  
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan terintegrasi	Persentase Sistem Kearsipan yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah obyek pengawasan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pengawasan arsip 5 tahun dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Persentase Sistem Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan pembinaan arsip sesuai dengan system pengelolaan kearsipan</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	Kearsipan yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah obyek Pembinaan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pembinaan arsip 5 tahun dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah	Nilai Standar Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan provinsi tiap tahunnya</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Nilai Standar Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan masyarakat bagi	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kunjungan perpustakaan provinsi tiap tahunnya</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Pengunjung perpustakaan tahun N/ Jumlah Pengunjung perpustakaan 5 tahun dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Pemuda dan Olahraga (Wajib) Pariwisata (Pilihan)
- : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Domain Pendidikan + Kesehatan dan Kesejahteraan + Ketenagakerjaan dan Kesempatan + Partisipasi dan Kepemimpinan + Gender dan Diskriminasi / 5</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPS</li> </ul>
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda	Persentase Capaian Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan prestasi kepemudaan.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran + Persentase Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan / 2</li> <li>Tipe Penghitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng</li> </ul>
	Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda</li> <li>Formulasi Pengukuran : Jumlah wirausaha muda yang mandiri dibagi jumlah pemuda yang dibina atau difasilitasi dikalikan 100%</li> <li>Tipe Penghitungan : Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatkan kualitas olahraga daerah	IPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas olahraga daerah</li> <li>Formulasi Pengukuran : Index partisipasi + Ruang terbuka + Kebugaran + SDM olahraga / 4</li> <li>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Kemenpora</li> </ul>
Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional</li> <li>Formulasi Pengukuran : Prestasi Olahraga Jawa tengah di tingkat nasional th (n)</li> <li>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng</li> </ul>
Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</li> <li>Formulasi Pengukuran : Perhitungan BPS Jawa Tengah :</li> <li>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : BPS</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Rp) dan Wisatawan Nusantara (Rp.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata serta potensi pasar</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp/orang/ perjalanan) +Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (Rp/orang/perjalanan)</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- FUNGSI : Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;  
2) pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;  
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;  
4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan SATPOL PP;  
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<b>Tujuan :</b>		
Terpeliharanya kondusivitas daerah di Jawa Tengah	Persentase kab/kota yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pencapaian sasaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas untuk menciptakan kondusifitas kab/kota di Jawa Tengah dapat mencapai tujuan OPD</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jml Kab/kota yang kondusif}}{\text{Jml kab/kota di Jawa Tengah}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>Sasaran :</b>		
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas	Persentase kab/kota yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pencapaian sasaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas untuk menciptakan kondusifitas kab/kota di Jawa Tengah dapat mencapai tujuan OPD</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jml Kab/kota yang kondusif}}{\text{Jml kab/kota di Jawa Tengah}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAH : Penunjang Pemerintahan

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tugas tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Jenis Data, Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Intern Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level 3 Penuh Kapabilitas APIP</li> <li>2. Nilai 3,5 Maturitas SPIP</li> </ol>	
Sasaran :		
1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level 3 pada Elemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Peran dan Layanan"</li> <li>2. "Praktik Profesional"</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Peran APIP yang profesional, efektif dan optimal dapat diukur melalui level Kapabilitas APIP</li> <li>• Formulasi Pengukuran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan <i>Key Process Area</i> (KPA) "Audit Kinerja/Evaluasi Program" dari <i>In Progress</i> menjadi <i>Institutionalized</i>;</li> <li>2. Peningkatan KPA "Perencanaan Audit Berbasis Risiko" dan " Kerangka Kerja Mengelola Kualitas" dari <i>In Progress</i> menjadi <i>Institutionalized</i>;</li> <li>3. Peningkatan KPA "Pengawasan Manajemen terhadap keg. APIP" dari <i>In Progress</i> menjadi</li> </ol> </li> </ul>



	3. "Struktur Tata Kelola"	<p><i>Institutionalized.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Data : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Hasil <i>Quality Assesment</i> dan verifikasi dari BPKP</li> </ul>
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	<p>Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian</li> <li>2. Penilaian Risiko</li> <li>3. Kegiatan Pengendalian</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi</li> <li>5. Pemantauan dan Pengendalian Intern</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : SPIP merupakan salah satu bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (<i>reasonable assurance</i>) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nilai pada 6 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5</li> <li>2. Peningkatan nilai pada 2 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5</li> <li>3. Peningkatan nilai pada 10 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5</li> <li>4. Peningkatan nilai pada 2 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5</li> <li>5. Peningkatan nilai pada 1 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5</li> </ol> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Hasil <i>Quality Assesment</i> dan verifikasi dari BPKP</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**  
 Tahun 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya.

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
 3. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  
 4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Jenis Data, Sumber Data)
<i>Tujuan :</i>		
Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melayani DPRD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi pengukuran : Hasil Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Sekretariat DPRD</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Tingkat Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	persentase capaian kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melayani DPRD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi pengukuran : Hasil Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Sekretariat DPRD</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

URUSAN : Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan & PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN Penelitian dan Pengembangan).

TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, bidang riset dan pengembangan, dan bidang inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah.

FUNGSI :  
 a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;  
 d. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;  
 e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata ketercapaian indikator sasaran.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Diukur dari ketercapaian indikator kinerja program dibagi target indikator kinerja program dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Implementasi hasil kelitbangan iptekin sesuai dengan program pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih agar terlaksananya Kelitbangan Iptekin yang sesuai dengan program pembangunan daerah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Hasil kelitbangan iptekin yg sesuai dengan program perencanaan pembangunan dibagi total hasil kelitbangan dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Penunjang / Pendapatan  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;  
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;  
e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat capaian penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>((PAD_t - PAD_{t-1}) / PAD_{t-1}) \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Badan Pengelola Pendapatan Daerah.</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Mengukur dan sebagai salah satu sumber pendapatan utama BPPD dalam berkontribusi terhadap PAD</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>((PD_t - PD_{t-1})/PD_{t-1}) \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPPD Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
Meningkatnya Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Mengukur dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama BPPD dalam berkontribusi terhadap PAD</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>(Ret \&amp; Pendapatan Lain_t - Ret \&amp; Pendapatan Lain_{t-1} / Ret \&amp; Pendapatan Lain_{t-1}) \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPPD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAH : Penunjang / Keuangan  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI : a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;  
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;  
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	sesuai kaidah Perundangan	<p>dan Akuntabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Penanggungjawab : BPKAD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
TUJUAN		
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Kontribusi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar dapat memberikan kontribusi Penerimaan Pendapatan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPD x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Terwujudnya Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya manajemen dan Administrasi Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar dapat memberikan kontribusi Penerimaan Pendapatan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPD x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BKD PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

**URUSAN PEMERINTAHAN**

**YANG DILAKSANAKAN**

**TUGAS POKOK**

: Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan  
 : Membantu Gubernur Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dibidang Kepegawaian yang Menjadi Kewenangan Daerah

**FUNGSI**

- :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENJELASAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan 1 :</i>		
Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	Nilai Sistem Merit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator dipilih untuk mengetahui tingkat perbaikan manajemen Aparatur Sipil Negara.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Bobot Skor merit.</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• SumberData : BKD Prov Jateng</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Distribusi Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	Presentase Distribusi Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator dipilih untuk mengetahui PNS telah didistribusikan penempatannya dalam jabatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah PNS yang didistribusikan penempatannya dalam jabatan DIBAGI Jumlah seluruh PNS x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan : Kumulatif</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENJELASAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Data : BKD Prov Jateng</li> </ul>
<p>Pelayanan Kepegawaian Yang cepat dan terintegrasi</p>	<p>Presentase Pengembangan layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk Mengetahui jumlah layanan Kepegawaian yang dikembangkan secara cepat dan terintegritasi</li> <li>• FormulasiPengukuran : Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terlayani dibagi Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian x 100%</li> <li>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAH : Kepegawaian dan Diklat.  
 YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara;  
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;  
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;  
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;  
 e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten menjalankan tugas jabatan	Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah (melalui sertifikasi kompetensi atau porofolio pengembangan kompetensi).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\sum ASN \text{ yg kompeten}}{\sum ASN} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa ASN Provinsi Jawa Tengah lulus pengembangan kompetensi (yang sesuai dengan jabatannya).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\sum \text{ASN lulus PK sesuai dgn jabatan}}{\sum \text{ASN yg mengikuti PK}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya penjaminan kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah ASN yang disertifikasi kompetensinya (dibandingkan dengan ASN yang harus disertifikasi).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\sum \text{ASN lulus uji kompetensi}}{\sum \text{ASN yg hrs disertifikasi}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**KINERJA UTAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TH, 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Keamanan dan Ketertiban Umum
- FUNGSI : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- FUNGSI :
- a. perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pembinaan, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat keparahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik</li> <li>• Formulasi Pengukuran :</li> <li>• Jumlah masyarakat yang paham dibagi dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</li> <li>b. BPS Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Lemhanas RI</li> <li>d. Kemenag Provinsi Jawa Tengah</li> </ol> </li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau, mengevaluasi dan mengukur tingkat kerukunan masyarakat, pembangunan karakter dan ideologi Pancasila, pengembangan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat Jawa Tengah</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Masyarakat yang paham dibagi dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</li> </ol> </li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. BPS Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Lemhanas RI</li> <li>d. Kemenag Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me mantau dan mengevaluasi tingkat pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap aspek-aspek IDI.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah masyarakat yang paham dibagi jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman di kali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

- URUSAN : Urusan Pemerintahan  
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan, penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan penyelenggaraan pemerin tahan daerah dan masyarakat Jawa Te ngah di Jakarta.  
b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Te ngah di Jakarta.  
c. Jakarta.  
d. Pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga Negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan masyarakat Jateng di Jakarta .  
e. Jakarta .  
f. Pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di Jakarta.  
g. Pengelolaan Anjungan Jawa Tengah di TMII.  
h. Pengelolaan Wisma Pemerintah Daerah di Jakarta .  
i. Fasilitasi Informasi dan Promosi Jawa Tengah  
j. Pelaksanaan Ketatausahaan Kantor.  
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menjembatani kualitas pelayanan terhadap pejabat dan masyarakat Jawa Tengah oleh Badan Penghubung .</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Nilai IKM yg didapat dikonversikan dengan nilai dasar</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah .</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketercapaian pelayanan terhadap pejabat dan masyarakat Jawa Tengah oleh Badan Penghubung .</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Nilai IKM yg didapat dikonversikan dengan nilai dasar 25.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN** : Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS)
- TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- FUNGSI** : a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;  
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;  
c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;  
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;  
e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam PB	Indeks Ketahanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagian besar wilayah di Jateng termasuk rawan bencana</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Indeks ketahanan daerah   <math display="block">\frac{\text{Hazard (H)} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity (C)}}</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : BPBD ProvJawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya upaya Mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagian besar wilayah di Jateng termasuk rawan bencana Mengukur sarprasa bencana yang harus disediakan bahan penyusunan kebijakan PB</li> <li>• Formulasi Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kapasitas PB terbentuk}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100\%</math> </li> <li>• Tipe Penghitungan : Non komulatif</li> <li>• Sumber Data : BPBD ProvJawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya.

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;  
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;  
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;  
 d. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kerjasama Daerah yang efektif pelaksanaannya.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah kerjasama tahun berjalan yang efektif dibagi jumlah kerjasama yang terealisasi dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kabupaten/Kota yang administrasi pemerintahannya tertib di dengan fokus pada administrasi penataan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, trantibum dan pertanahan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi pemerintahannya tertib pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kabupaten/Kota se Jateng dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kabupaten/Kota yang pelaksanaan otonomi daerah nya tertib dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan otonomi daerahnya tertib pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kabupaten/Kota se Jateng dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi lainnya
- : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bidang hukum, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.
- FUNGSI : 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan		
Meningkatkan efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	1. Prosentase Kebijakan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) dikali 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	2. Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar tercapai IKU perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi jumlah target IKU perangkat daerah dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Sasaran		
1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai kaidah pembentukan per-undang-undangan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Produk Hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali 100 %</li> <li>Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2. Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengkaji seberapa banyak jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan</li> <li>• Formulasi Pengukuran :</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Daerah		<p>Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Peningkatan prosentase produk hukum daerah yang diinformasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah produk hukum yang diinformasikan melalui website JDI Hukum</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	Prosentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kebijakan Pemerintah Provinsi dibidang hukum yang ditangani dan diselesaikan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;  
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;  
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;  
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;  
e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga; dan  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	Prosentase Kebijakan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief).</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) dikali 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase hasil rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang d</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	<p>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Startegis Bidang Kesejahteraan rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	<p>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian kinerja kesejahteraan rakyat yang dievaluasi dibagi jumlah capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi lainnya.  
 : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Sumber Daya ASN bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

FUNGSI : a. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;  
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;  
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;  
 d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;  
 e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;  
 f. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan di bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis</li> <li>Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak OPD yang capaian realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan target RKO. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target dan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jateng.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Indikator kinerja kegiatan APBD yang tercapai dibagi jumlah seluruh Indikator kegiatan APBD dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	<p>Persentase tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian kegiatan pada kab/kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada kab/kota.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	<p>Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan OPD dalam melaporkan pelaksanaan APBD dan ketepatan kab/kota dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan sesuai kaedah dibagi Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	<p>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset OPD dalam pelaksanaan APBD</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

**URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Fungsi lainnya  
: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

**FUNGSI** :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah dan badan usaha milik daerah serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas badan usaha milik daerah dan perangkat daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya asn di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
6. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Type Pengukuran dan Sumber Data)
Tujuan :		

Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian</li> </ul>
Sasaran :		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Porsentase rekomendasi bidang perekonomian yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi dengan jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan</li> <li>• Type Pengukuran : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Perekonomian</li> </ul>
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian</li> <li>• Formulasi Pengukuran : jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian yang menjadi target dibagi dengan jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian</li> <li>• Type Pengukuran : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Perekonomian</li> </ul>
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian yang tercapai sesuai target dibagi dengan seluruh jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian</li> <li>• Type Pengukuran : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Perekonomian</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM  
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN : Fungsi lainnya  
 YANG DILAKSANAKAN

Tugas : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;  
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;  
 c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;  
 d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;  
 e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;  
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
1. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) dikali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi rekomendasi usulan kebijakan yang terealisasi di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian</li> </ul>
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang mencapai target dibagi jumlah Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian</li> </ul>
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian</li> </ul>



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya.  
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;  
b. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;  
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;  
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;  
e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan  
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik.</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang tugas dan fungsinya optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji agar terwujud Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan fungsinya optimal berdasarkan Peraturan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yg optimal tusinya dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak UPP yang memperoleh nilai IKM baik untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan masyarakat.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah UPP yang nilai IKM baik dibagi jumlah seluruh UPP dikalikan 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa</li> </ul>
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang nilai Sasaran dan Area Perubahan RB telah mencapai B dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa.</li> </ul>
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks Reformasi Birokrasi-nya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kab/Kota yang meningkat Indeks RBnya.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/ Kota yang meningkat indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
		nya dibagi jumlah kabupaten/kota se jawa tengah • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO UMUM SETDA PROV JATENG 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi lainnya.
- FUNGSI : Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan.
- FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;  
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;  
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;  
d. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan  
e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan 1 :</i>		
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Umum Setda Provinsi Jawa</li> </ul>

Sasaran :		
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator Ini Dipilih Untuk Mengukur Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Umum yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Umum dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator Ini Dipilih Untuk Mengukur Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Hasil Survei IKM Pelayanan Umum, keprotokolan dan Kehumasan</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya.

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

: Menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

FUNGSI

- : a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Efektivitas Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU Perangkat yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU Perangkat dikalikan 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase efektifitas pelayanan pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian efektifitas pelayanan pengadaan barang/jasa.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlaksana sesuai SOP dibagi paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2018 – 2023**

- URUSAN PEMERINTAHAN : Kesehatan  
 YANG DILAKSANAKAN :  
 TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;  
 b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;  
 c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;  
 d. Pelayanan medis;  
 e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;  
 f. Pelayanan keperawatan;  
 g. Pelayanan rujukan;  
 h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;  
 i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;  
 j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;  
 k. Pengelangan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN ( Alasan pemilihan Indikator, Formasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : RSUD Dr. Moewardi</li> </ul>



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO  
TAHUN 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Urusan Kesehatan
- FUNGSI : Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.  
b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.  
c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.  
d. Pelayanan Medis.  
e. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.  
f. Pelayanan Keperawatan.  
g. Pelayanan Rujukan.  
h. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian.  
i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.  
j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi.  
k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran :</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Jumlah capaian indikator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Urusan Kesehatan.  
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- FUNGSI** : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;  
b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;  
c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;  
d. pelayanan medis;  
e. pelayanan penunjang medis dan non medis;  
f. pelayanan keperawatan;  
g. pelayanan rujukan;  
h. pelaksanaan pendidikan dan penelitian;  
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;  
j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan  
k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator Kinerja : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\text{Jumlah capaian indikator SPM}}{\text{Jumlah total indikator SPM yang diukur}} \times 100</math></li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Urusan Kesehatan.  
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;  
b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;  
c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;  
d. Pelayanan medis;  
e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;  
f. Pelayanan keperawatan;  
g. Pelayanan rujukan;  
h. Pelaksanaan pendidikan dan penelitian;  
i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;  
j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan  
k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan Indikator Kinerja: Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada suatu tahun tertentu</li> <li>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pemilihan Indikator Kinerja : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien</li> <li>Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah capaian indikator SPM}}{\text{Jumlah total indikator SPM yang diukur}} \times 100</math></li> <li>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO TAHUN 2018-2023**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN  
 YANG DILAKSANAKAN  
 TUGAS POKOK

: Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

FUNGSI

- : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;  
 b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa;  
 c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;  
 d. Pelayanan medis Kesehatan Jiwa;  
 e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;  
 f. Pelayanan keperawatan;  
 g. Pelayanan rujukan;  
 h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;  
 i. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;  
 j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS</li> </ul>
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : RSJD Dr Amino Gondohutomo</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023**

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Bidang Kesehatan
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- FUNGSI** :
- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - b. Pelayanan Penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa.
  - c. Penyusunan rencana dan Program, Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - d. Pelayanan Medis Kesehatan Jiwa
  - e. Pelayanan Penunjang medis dan non medis
  - f. Pelayanan keperawatan
  - g. Pelayanan Rujukan
  - h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan jiwa
  - i. Penelitian dan Pengembangan serta pengabdian masyarakat
  - j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
( 1 )	( 2 )	(4)
<b>Tujuan :</b>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : BPS</li> </ul>
<b>Sasaran :</b>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan</li> <li>• Formulasi Pengukuran :</li> </ul>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
( 1 )	( 2 )	(4)
		$\frac{\text{Jml capaian indikator SPM}}{\text{Total indikator SPM yang diukur}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSJD DR. RM SOEDJARWADI PROV. JATENG  
TAHUN 2018-2023**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK** : Kesehatan  
: Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

- FUNGSI**
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - d. Pelayanan medis Kesehatan Jiwa;
  - e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - f. Pelayanan keperawatan;
  - g. Pelayanan rujukan;
  - h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;
  - i. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
  - j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<i>Tujuan :</i>		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</li> <li>• Formulasi pengukuran : Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( AgeSpecific Death Rate /ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite</li> <li>• Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Badan Pusat Statistik</li> </ul>



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<i>Sasaran :</i>		
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketercapaian standar pelayanan minimal (SPM) apakah mutu pelayanan di RS sudah baik, karena Standar Pelayanan Minimal di RS merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan RS</li> <li>Formulasi pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah capaian indikator SPM}}{\text{Total indikator SPM yang ditukur}} \times 100\%</math></li> <li>Jenis Data : Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*ttđ*

GANJAR PRANOWO